

DUA MENYEMAI DAMAI

Peran dan Kontribusi
Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama
dalam Perdamaian dan Demokrasi

Muhammad Najib Azca - Hairus Salim
Moh Zaki Arrobi - Budi Asyhari - Ali Usman



Gadjah Mada University Press

Prakata Editorial



Riset ini diawali oleh perbincangan ringan bernada galau di suatu sore di sebuah café di Jalan Kaliurang pada pertengahan Agustus tahun lalu.

Rangkaian panjang acara dalam rangka kenduri hari lahir Republik Indonesia baru saja usai, namun ruang dan diskursus publik kita telah kembali kusut oleh sengkaret sengketa gara-gara beda dukungan capres dan partai politik dan aneka konflik lainnya. Belum lagi banjir bandang *hoax* dan gelombang fitnah yang mengarus tanpa henti di media sosial maupun media massa. Sehingga terpantik tanya dan sekaligus ide: tidak ada kah keping inspirasi berharga yang bisa dipersembahkan oleh bangsa ini bagi dunia? Masa' narasi yang muncul dari negeri Katulistiwa nan kaya raya ini hanya rentetan cerita tentang pertikaian dan perselisihan atau akumulasi permusuhan dan kebencian yang menggunung dan memuncratkan amarah dan laknat belaka?

Lalu meletiklah ide tentang riset ini. Ihwal perlunya kita mengangkat narasi damai yang indah dan cemerlang yang telah dipahatkan oleh segenap anak bangsa dalam merawat dan membangun bangsa besar yang amat bhinneka ini; lebih dari seperempat miliar warga menghuni wilayah yang terbentang luas dari ujung Timur Papua hingga terdiri lebih dari 17.000 pulau besar dan kecil, dengan aneka budaya, adat istiadat, bahasa dan agama. Bukan kelahirannya benar (sebagai Bangsa) yang menusuk kalbu; tapi bagaimana kebhinnekaan yang kaya raya itu bisa tetap bertahan dan terawat sebagai satu keutuhan dalam harmoni itu yang lebih menguras energi dan pengorbanan.

Maka, perlahan muncullah gagasan riset yang akhirnya menjadi buku ini: mengumpulkan narasi-narasi kecil maupun besar yang dilakukan oleh berbagai actor yang terhimpun dalam dua ormas keagamaan Islam terbesar sejangat, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, yang bergerak di berbagai arena dan aras, yang akhirnya membentuk Islam yang berwajah Keindonesiaan, yang damai, demokratis dan berkadaban.

Di tengah krisis dan citra Islam yang buruk dan buram di pentas global, yang sebagian didominasi oleh tindakan kelompok ekstremisme kekerasan dan konflik sektarian berdarah berkepanjangan, maka seperti disampaikan oleh Buya Syafii Maarif di sampul belakang buku ini, “kehadiran Islam Indonesia yang dipresentasikan oleh Muhammadiyah dan NU mampu menjadi oase dan kiblat baru bagi masa depan Islam di dunia.”

Mungkin, bagi sebagian orang, cara pandang seperti itu dianggap agak sentimentil. Namun Buya Syafii tidak sendirian. Sejumlah pakar dan peneliti yang rajin melakukan penelitian komparatif juga menemukan ‘isyarat’ yang sama. Catatan Prof. Robert Hefner dari Boston University, Prof. Greg Barton dan Deakin University, juga refleksi diplomat senior dari Munk School of Global Affairs di Universitas Toronto Scott Gilmore menemukan petikan inspirasi serupa.

Meski mengusung optimisme, kita tentu tak boleh terjatuh pada sikap romantik yang tidak kritis. Bahwa kenyatannya Islam di Indonesia, termasuk Muhammadiyah dan NU, masih jauh dari paripurna. Bahkan, seperti diperingatkan oleh sejumlah peneliti seperti Singh (2007) dan Menchik (2018) bahwa kita dikepung oleh gelombang radikalisme dan intoleransi yang bukan mustahil berujung pada menguatnya apa yang disebut Singh sebagai “Talibalization” atau, minimal, seperti kata Menchik, terjadinya “Democratic breakdown”.

Tulisan ini ingin ditutup dengan rasa syukur dan terima kasih. Banyak pihak telah berkontribusi bagi lahir dan hadirnya buku ini. Salah satunya adalah Prof. Pratikno, dosen senior dan mentor,

yang meski sibuk sebagai ‘carik republik’ masih menyempatkan diri berdiskusi dan melecut adik-adiknya untuk terus menulis, meneliti dan berkarya. Tanpa dukungan dari Ketua MWA UGM ini proyek riset ini mustahil bisa dijalankan.

Dukungan berikutnya datang dari jajaran pimpinan UGM. Tanpa sikap terbuka dan dukungan penuh dari Rektor UGM Prof. Panut Mulyono, Wakil Rektor Dr. Paripurna P. Sugarda, Sekretaris Eksekutif Rektorat Dr. Gugup Kismono, dan Kepala BPP UGM Dr. Widodo dan jajarannya, penerbitan buku ini dan rangkaian acara peluncuran buku dan diskusi publik yang direncanakan tidak akan bisa terwujud.

Buku ini tidak akan lahir tanpa kerja keras tim peneliti dan asisten yang teguh dan tekun bekerja dalam sunyi. Meski waktu riset yang tersedia tidak panjang, kami beruntung mendapatkan tim peneliti dan asisten yang sangat berdedikasi, serta memiliki akumulasi pengetahuan yang berlimpah tentang topik yang dikaji. Maka proses riset berjalan dengan cepat, tentu juga karena dukungan para narasumber yang bermurah hati berbagi data dan narasi yang kaya kepada kami, baik melalui wawancara maupun FGD.

Tim dan pasukan kerja di PSKP UGM juga sangat penting mendukung proses dan irama kerja yang cepat dan spartan. Terima kasih kepada Bung ‘Kyai’ Munjid yang bersedia memimpin pasukan ketika saya ‘cuti umroh’, Bro Zaki yang selalu siap dengan tugas-tugas tak terduga, Bung Erich yang mengawal komunikasi publik, dan terutama sekali “Srikandi PSKP” yang sigap menuntaskan semua agenda, baik substantive maupun teknis: Mbak Arifah, Mbak Didien, Mbak Ayu, Mbak Aang, dan Mbak Indah. Juga Mas Parman, Mas Supri, dan Mas Slamet yang acap menemani lembur.

Di luar PSKP, kegiatan ini juga tidak akan lancar tanpa dukungan sebuah jamaah kecil di kampus Fisipol yang solid dalam ‘kerja dan guyon’. *Matur nuwun* Mas EAP, mas NPM, mas DA, mas BJ, dan mas Marto.

Khusus dalam dalam persiapan penerbitan buku ini peran sobat lawas Mas Yahya tak tergantikan. Dengan sabar, telaten dan cerewet ia mengawal proses penerbitan buku yang ruwet dan detail. Terima kasih juga untuk mas Erwan dan mas Ipin yang menyumbangkan desan sampul yang keren.

Terakhir, ucapan terima kasih terbesar tentu disampaikan kepada Allah Swt yang telah membimbing kami dalam mengerjakan tugas-tugas kecil dalam merawat kewarasan dan keadaban kehidupan bersama ini. Juga kepada seluruh keluarga yang merelakan kami 'absen' dari sejumlah kewajiban kadang justru di saat-saat penting dan genting.

Akhirulkalim, semoga kontribusi kecil kami bagi ikhtiar merawat kehidupan bersama yang lebih baik ini membawa berkah dan manfaat.

Salam Damai dan Salam Sejahtera,

Muhammad Najib Azca
Ketua Tim Peneliti PSKP UGM



Kata Pengantar

Rektor Universitas Gadjah Mada

Rektor Universitas Gadjah Mada menyambut dengan bangga dan gembira penerbitan buku hasil riset yang dilakukan oleh Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) yang berjudul *Dua Menyemai Damai: Peran Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam Demokrasi dan Perdamaian*. Kehadiran buku ini sangat tepat waktu dan pada momen yang sangat strategis, yaitu pada saat dunia internasional sedang mengalami masa paceklik narasi dan inspirasi mengenai corak keislaman yang damai, demokratis, dan berkeadaban. Bahkan, hingga tingkat tertentu, wacana keislaman di kancah regional dan global justru didominasi oleh diskursus kekerasan, ekstremisme, dan sektarianisme yang dilakukan oleh sejumlah kelompok yang mengatasnamakan Islam. Sebut saja fenomena ISIS di Timur Tengah dan ‘cabangnya’ di seantero penjuru dunia yang telah menelan korban kemanusiaan begitu banyak. Di tengah kegersangan wacana keislaman yang damai, demokratis, dan berkeadaban inilah kiprah-kiprah kemanusiaan yang telah dilakukan oleh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama perlu mendapat apresiasi yang lebih kuat dan luas terutama di kancah komunitas internasional.

Karena alasan itulah maka saya menyambut positif langkah yang dilakukan oleh tim peneliti dari PSKP UGM yang telah melakukan riset mendalam tentang peranan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam pembangunan perdamaian dan demokrasi

di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional. Hasil dari riset tersebut yang sekarang menjelma menjadi buku yang berada di tangan pembaca. Saya mengapresiasi setinggi-tingginya ikhtiar yang dilakukan oleh tim peneliti PSKP UGM yang berhasil menggali dan kemudian menarasikan salah satu mutiara bangsa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia: Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

Kita semua tentu patut bersyukur bahwa bangsa Indonesia telah berhasil melampui sejumlah fase kritis dalam perjalanan kebangsaan dan kenegaraannya. Antara lain, mampu melintasi fase kritis Transisi Demokrasi yang dimulai sejak Gerakan Reformasi pada tahun 1998 hingga saat ini proses demokrasi Indonesia telah memasuki fase yang sering disebut oleh para pakar sebagai Konsolidasi Demokrasi. Saat ini Indonesia bahkan dikenal sebagai negara demokrasi dengan penduduk muslim terbesar di dunia.

Tentu saja proses Transisi Demokrasi maupun Konsolidasi Demokrasi tersebut tidak mungkin bisa berjalan dengan baik tanpa dukungan kuat dan luas dari Masyarakat Madani, khususnya yang berbasis keagamaan Islam di Indonesia. Seperti ditunjukkan dalam buku ini, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sebagai pilar Masyarakat Madani memiliki peran dan kontribusi yang signifikan dalam mengawal proses transisi dan konsolidasi demokrasi yang damai tersebut. Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama merupakan 'Dwi Tunggal' organisasi Islam terbesar di Indonesia berdiri di garis terdepan dalam mendorong proses reformasi dan mengawal cita-cita demokrasi hingga saat ini dan ke depan.

Dalam pandangan UGM, kedua organisasi Islam terbesar di Indonesia itu telah berkontribusi secara aktif dan positif terhadap pembangunan perdamaian dan demokrasi di Indonesia. Kontribusi keduanya dalam bidang pendidikan, kesejahteraan sosial, kesehatan, ekonomi, kebencanaan, hingga ikhtiar resolusi konflik dan bina damai telah secara nyata dirasakan tidak hanya oleh masyarakat Indonesia, namun juga oleh masyarakat di berbagai belahan di dunia. Spektrum kontribusi mereka telah melintasi batas-batas suku, budaya, agama, dan negara.

Universitas Gadjah Mada sebagai universitas nasional, universitas perjuangan, universitas Pancasila, universitas kerakyatan, dan universitas pusat kebudayaan tentu senantiasa berkomitmen untuk turut, serta merawat dan mengembangkan nilai-nilai perdamaian dan demokrasi dalam masyarakat Indonesia dan dunia. Oleh karena itu, buku ini sangat gayut dengan komitmen UGM. Semoga dengan ini, kita dapat mempromosikan peranan Islam Indonesia dalam pembangunan perdamaian dan demokrasi di kancah nasional, regional, dan internasional sekaligus mengangkat Islam Indonesia sebagai salah satu ‘model’ Islam yang selaras dengan nilai-nilai demokrasi dan perdamaian di kancah internasional

Akhir kata, saya sangat mengapresiasi penerbitan buku ini dan sangat merekomendasikan seluruh anak bangsa untuk ikut membacanya. Semoga buku ini dapat menjadi salah satu sumbangsih dan ‘prasasti’ UGM bagi perdamaian dan demokrasi di Indonesia dan di dunia.

Yogyakarta, 10 Januari 2019
Rektor Universitas Gadjah Mada

Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng.

Endorsement



Di tengah-tengah padang sahara kekerasan, ekstremisme, sektarianisme dan kekacauan yang sedang melanda dunia Islam, kehadiran Islam Indonesia yang direpresentasikan oleh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama mampu menjadi oase dan kiblat baru bagi masa depan Islam di dunia. Peran kedua ormas Islam terbesar di dunia ini sangat penting diwartakan agar umat Islam tidak terus menerus berada di buritan peradaban. Buku ini secara apik menarasikan peran keduanya dalam bingkai perdamaian, kemanusiaan, dan demokrasi.

- **Prof. Dr. Ahmad Syafii Maarif**, Ketua Umum
PP Muhammadiyah 2000-2005, Pendiri Maarif
Institute for Culture and Humanity

Indonesia punya dua karunia sejarah yang tak dimiliki bangsa mana pun lainnya. Pertama, para Bapak Bangsa memancang cita-cita peradaban mulia yang dirumuskan dengan sempurna dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, Indonesia punya aktor-aktor gerakan madani yang sungguh ikhlas berkomitmen pada cita-cita peradaban mulia itu dan tak kenal lelah merengkuh segenap warga Bangsa untuk memperjuangkannya, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Di tengah kemelut yang makin tak menentu hari-hari ini, dua hal itulah yang paling dibutuhkan Dunia. Dunia perlu berkaca pada Indonesia, pada Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, yang dinarasikan dengan cantik di buku ini.

- **K.H. Yahya Cholil Staquf**, Katib Aam Syuriah
PBNU 2015-2020, Co-Founder *Bayt ar Rahmah*,
Winston-Salem, Amerika Serikat

Buku ini berangkat dari tesis yang sangat penting dan tepat waktu: bahwa salah satu aktor strategis dalam proses konsolidasi demokrasi di Indonesia adalah organisasi masyarakat sipil berbasis keagamaan Islam di Indonesia, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Sudah lama kedua “*religious social-welfare organizations*” –yang notabene, adalah organisasi sosial Muslim yang terbesar di dunia– diakui dan dihargai sebagai aktor Muslim yang memegang peranan sentral di dalam pembentukan daya sosialiasi keyakinan kultural bahwa nilai-nilai Islam sama sekali tidak bertentangan dengan demokrasi. Namun, walaupun fakta ini diketahui secara umum sejak dasawarsa 1980-an dan 1990-an, peranan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di dalam proses konsolidasi demokrasi pada era Reformasi/pasca-Orde Baru belum diteliti secara sistematis.

Namun, berdasarkan penelitian yang terperinci dan paling *up to date*, *Dua Menyemai Damai* berhasil memberikan pencerahan tentang peranan *crucial* yang dipegang kedua organisasi ini dalam pembentukan dan pelestarian sebuah budaya politik demokratis di Indonesia. Para penulis menunjukkan dengan meyakinkan aktivitas warga dan lembaga Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam proses perdamaian pada awal era Reformasi, dan dalam pembelaan hak warga kaum minoritas, baik yang non-Muslim maupun yang Muslim. Para penulis juga memperlihatkan berbagai upaya ragam aktor Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam upaya bina damai, baik di kancah regional maupun internasional. Penulis sekaligus menunjukkan betapa besar peranan kedua organisasi ini di dalam upaya meng-*counter* agenda gerakan transnasional dan ekstremis yang menolak demokrasi dan kewargaan multietnis dan multiagamis berdasarkan Pancasila. Lewat uraian yang sedemikian komprehensif dan penting, penulis berhasil membuktikan sebuah kenyataan dasar dari demokrasi di Indonesia: bahwa Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama adalah pilar utama dari sebuah Islam berkeadaban yang menjamin dan melestarikan konsolidasi demokrasi di Indonesia. Bahkan, lewat aktivitas secemerlang ini, Muhammadiyah dan Nahdlatul

Ulama telah memberikan sebuah pelajaran penting untuk seluruh dunia tentang kompatibilitas Islam dan demokrasi di dunia modern ini.

- **Prof. Robert W Hefner**, former Director Institute on Culture, Religion, and World Affairs (CURA), Boston University, Amerika Serikat

Indonesia bukan saja negara terbesar di dunia Islam, tetapi juga negara tersukses—dalam berbagai bidang. Transisi demokrasi yang berlangsung dua dekade di Indonesia disertai transformasi sosial dan ekonomi yang cukup ekstensif. Dalam perubahan ini Islam dan Masyarakat Sipil Muslim berperan amat penting. Sumbangan unik buku ini ialah membongkar dan menjelaskan secara mendetail kontribusi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam bina damai dan mengokohkan budaya demokrasi. Budaya Islam Indonesia yang moderat dan progresif memang penting, tetapi hanya bisa menjadi kekuatan transformasional jika digerakkan lewat masyarakat madani. Dalam hal ini, kedua ormas Islam yang tidak ada tandingan di seluruh dunia Islam ini memberi berbagai sumbangan berharga pada setiap tingkat. Sayangnya, seperti juga peremehan terhadap demokrasi Indonesia sendiri, sumbangan ini sering diremehkan dengan memberi perhatian yang berlebihan pada kelemahan institusional yang manusiawi dan mengabaikan kontribusi substantif dan berkelanjutan yang diberikan. Padahal narasi-narasi tersebut perlu difahami lebih baik oleh mereka yang peduli terhadap reformasi.

- **Prof Greg Barton**, Chair in Global Islamic Politics, Deakin University, Australia

Islam Indonesia adalah Islam *wasathiyah*, Islam jalan tengah yang inklusif, akomodatif, toleran, dan damai. Muhammadiyah dan NU adalah lokomotif Islam Indonesia *wasathiyah*; keduanya tidak hanya merupakan *jam'iyah* dakwah dan pendidikan, tapi *Islamic-based civil society* yang menjadi *bridging and mediating force between state and society*. Dengan begitu, Muhammadiyah dan NU berperan

instrumental dalam pembangunan *civic culture* dan *civility* yang memungkinkan tumbuhnya budaya politik damai dan demokrasi. Negara-negara Muslim lain beserta umat Islam masing-masing patut belajar dari Islam Indonesia *wasathiyah* dengan Muhammadiyah dan NU sebagai tulang punggungnya untuk membangun religio-politik yang damai dan berkeadaban.

- **Prof. Azyumardi Azra**, CBE, UIN Jakarta dan anggota AIPI

Ringkasan Eksekutif

Buku ini bertolak dari pertanyaan kecil mengenai apa dan bagaimana peran Muhammadiyah dan NU dalam pembangunan perdamaian dan demokrasi di kancah nasional, regional, dan internasional? Pertanyaan ini sangat relevan di tengah konflik kekerasan yang berkecamuk dan merebaknya ekstremisme, serta sektarianisme di dunia Islam. Acap kali Islam di Indonesia dipandang mampu menampilkan diri sebagai ‘model’ keislaman yang selaras dengan demokrasi, perdamaian, dan kemanusiaan. Setelah keluar dari otoritarianisme rezim ‘orde baru’ Suharto, Indonesia tampil secara meyakinkan dan cemerlang sebagai negara demokratis dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Salah satu aktor utama di balik kesuksesan demokratisasi Indonesia ini adalah kekuatan organisasi berbasis keagamaan Islam, yakni Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Peranan keduanya sebagai pilar ‘Islam sipil’ berhasil membangun fondasi yang kokoh bagi proses demokratisasi di Indonesia pascareformasi 1998. Bahkan, kedua organisasi massa Islam terkemuka ini semakin aktif berkontribusi pada bidang perdamaian dan demokrasi di aras regional dan internasional.

Capaian Islam Indonesia dalam membangun dan mengukuhkan perdamaian dan demokrasi di negara kepulauan tersebut, tentu, masih jauh dari sempurna. Sejumlah persoalan dan tantangan yang cukup berat masih menghadang perjalanan Islam Indonesia kontemporer. Namun demikian, kontribusi dan peran positif Muhammadiyah dan NU dalam perdamaian dan demokrasi di negara terbesar di Asia Tenggara tersebut tetap patut diapresiasi, khususnya di panggung pergaulan internasional. Untuk tujuan

itulah buku ini diterbitkan dengan mewartakan narasi-narasi keislaman yang demokratis dan damai—baik di aras lokal, nasional, regional hingga internasional—dari ‘Dwi Tunggal’ organisasi kemasyarakatan keagamaan terbesar di dunia ini.

Metode

Argumen-argumen dalam buku ini dibangun melalui hasil riset pustaka dan riset lapangan selama kurang lebih tiga bulan (Oktober-Desember 2018). Proses riset pustaka telah dimulai sejak bulan Oktober 2018 dengan mengumpulkan data-data sekunder yang terkait dengan peran Muhammadiyah dan NU dalam perdamaian dan demokrasi. Data sekunder ini juga didapat melalui penelusuran di berbagai media, baik media luring maupun media daring. Selanjutnya, proses riset lapangan dimulai pada bulan November 2018 dengan mengkombinasikan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan diskusi kelompok terarah (*focus group discussion*). Riset lapangan berupa wawancara mendalam dilakukan di Yogyakarta, Jakarta, Surakarta, Surabaya, dan Magelang. Sedangkan, diskusi kelompok terarah diselenggarakan tiga kali dan berlangsung di Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian UGM. Diskusi kelompok terarah melibatkan total 17 narasumber yang terdiri dari akademisi, praktisi, dan aktivis yang *concern* dengan peran perdamaian dan demokrasi yang dilakukan oleh Muhammadiyah dan NU. Sedangkan, wawancara mendalam dilakukan terhadap 27 informan yang mayoritas merupakan tokoh dan pegiat Muhammadiyah dan NU.

Temuan dan Argumen

Ada tiga argumen yang hendak disampaikan dalam buku ini berdasarkan temuan yang didapatkan dalam riset yang dikerjakan. *Pertama*, proses transisi menuju demokrasi yang terjadi di Indonesia hanya bisa berjalan berkat dukungan yang kuat dan luas dari komponen-komponen masyarakat sipil, terutama sekali oleh

Muhammadiyah dan NU sebagai dua organisasi massa Islam terbesar di Indonesia. Terlepas dari tingginya dinamika internal dan kompleksitas yang melingkupi dua ormas ini, Muhammadiyah dan NU merupakan aktor penting dan strategis yang berada di garda terdepan dalam proses transisi politik dramatis yang penuh turbulensi itu. Peranan Muhammadiyah dan NU ini sangat penting kaitannya dalam memastikan jalannya transisi demokrasi yang damai dan berkeadaban, mengingat di banyak negara sering kali transisi politik dari otoritarianisme menuju demokrasi diwarnai dengan konflik kolektif, perang saudara, hingga kekerasan sektarian berkepanjangan. Kontribusi besar Muhammadiyah dan NU pada era transisi demokrasi terlihat dari kiprah pucuk pimpinan kedua ormas ini, yakni Prof Dr Amien Rais dan K.H. Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, sebagai dua tokoh terkemuka reformasi Indonesia. Keduanya bahkan sempat menduduki dua jabatan tertinggi di Indonesia: Amien Rais sebagai Ketua MPR-RI dan Gus Dur sebagai Presiden RI.

Kedua, Muhammadiyah dan NU, baik melalui kekuatan struktural dari pusat hingga ranting maupun sayap-sayap kultural yang dimilikinya telah dan terus memainkan peran penting dalam proses konsolidasi demokrasi di Indonesia. Peran positif sebagai konsolidator demokrasi ini terutama sekali terlihat dalam upaya-upaya Muhammadiyah dan NU dalam membangun ‘perdamaian positif’ (*positive peace*) melalui berbagai kiprahnya di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, filantropi, kebencanaan, dan dakwah sosial kemasyarakatan. Muhammadiyah menunjukkan kontribusi yang luar biasa dalam upaya-upaya menghadirkan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat, antara lain, melalui aktivisme filantropis dan pelayanan sosial di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan belakangan kebencanaan. Sementara itu, NU nampak menonjol dalam kontribusi kulturalnya dalam mempromosikan dan mengarusutamakan ajaran Islam yang penuh dengan kedamaian dan toleransi, juga dalam upayanya membendung arus ekstremisme dan intoleransi keagamaan yang belakangan merebak.

Ketiga, Muhammadiyah dan NU juga turut aktif berkiprah dalam proses pembangunan perdamaian di aras nasional, regional, dan internasional. Meskipun upaya bina damai di aras regional dan internasional tersebut belum menampakkan dampak yang masif dan gemilang, namun peran aktif kedua organisasi masa Islam tersebut dalam proses perdamaian mampu menjadi ‘*antidote*’ dari wajah Islam di panggung internasional, di mana sejumlah tokoh dan gerakan Islam menjadi aktor konflik dan kekerasan yang menonjol, seperti yang terlihat di kawasan Timur Tengah dan Asia Tengah. Di kancah regional dan internasional, Muhammadiyah berkiprah aktif dengan program filantropi dan bantuan kemanusiaan yang diwujudkan dalam pendirian rumah sakit dan sekolah di Rakhine State, Myanmar, dan Palestina, penyediaan ratusan beasiswa penuh untuk komunitas Mindanao di Filipina dan Pattani di Thailand Selatan, serta pemberdayaan ekonomi dan pendidikan di kalangan Bangsa Moro Filipina. Sementara itu, NU memiliki komitmen yang tinggi dalam ikhtiar mencari resolusi konflik dan bina damai di sejumlah zona konflik internasional. Misalnya, dalam konflik sektarian di Afghanistan, NU mengirim delegasi-delegasi ulama Indonesia dan mengundang, serta memfasilitasi berbagai pihak yang berperang untuk berdialog dan mencari solusi bersama. Sedangkan, dalam konflik berdarah yang berkepanjangan antara Palestina dan Israel, NU mencoba meretas jalan damai yang nyaris mustahil melalui misi perdamaian yang dirintis oleh Gus Dur dan dilanjutkan belakangan oleh K.H. Yahya Cholil Staquf.

Rekomendasi

Buku ini diakhiri dengan sejumlah rekomendasi kebijakan yang tidak hanya ditujukan bagi para pembuat kebijakan (*policy makers*) dan kedua organisasi masa Islam ini, yaitu Muhammadiyah dan NU, namun juga untuk lingkungan strategis dan dunia internasional. Rekomendasi ini tidak hanya terkait dengan promosi pembangunan perdamaian dan demokrasi, namun juga memuat masukan-masukan strategis tentang peran-peran kebangsaan dan

lintas-bangsa yang diharapkan semakin diperankan oleh Muhammadiyah dan NU. Sejumlah rekomendasi utama itu antara lain:

- 1) Pentingnya membangun hubungan Muhammadiyah dengan NU yang lebih kuat, dekat, sinergis, dan kolaboratif. Kedua pimpinan kedua ormas dan elit-elitnya perlu memiliki kedisiplinan dan komitmen yang tinggi untuk ‘menjaga jarak’ dan menahan diri dari keterlibatan langsung dalam perancangan politik elektoral yang cenderung memecah belah. Muhammadiyah dan NU perlu fokus dan konsisten sebagai ‘jangkar etika’ dan ‘kompas moral’ di tengah panggung sosial, ekonomi, dan politik nasional.
- 2) Aliansi Islam Indonesia yang digawangi oleh Muhammadiyah-NU perlu memperluas kekuatan dan dukungannya di antara organisasi-organisasi massa Islam lainnya yang memiliki komitmen kuat pada Islam yang damai, demokratis, dan berkeadaban di Indonesia. Poros strategis Muhammadiyah-NU ini perlu diperluas dan diperkuat untuk mempromosikan ‘model’ Islam Indonesia ke pentas regional dan internasional.
- 3) Muhammadiyah dan NU diharapkan selalu bersifat dan bertindak dewasa, mengayomi, dan melindungi hak dan eksistensi kelompok-kelompok umat beragama lain serta kelompok minoritas di Indonesia. Muhammadiyah dan NU diharapkan bukan menjadi dinding pembatas dan penghalang, namun sebaliknya menjadi ‘jembatan’ dan penyambung umat Islam Indonesia dengan komunitas agama lain dalam konteks bermasyarakat, beragama, berbangsa, dan bernegara.
- 4) Perlu dikembangkan relasi yang kokoh, saling menghargai, dan saling mendukung antara pemerintah di satu sisi dan Muhammadiyah-NU di sisi yang lain. Relasi yang harmonis sekaligus mutualistik ini harus dibangun di atas dasar

kepentingan kebangsaan, kemasyarakatan, dan kenegaraan bukan didasarkan atas proses dan kepentingan politik elektoral yang bersifat jangka pendek.

- 5) Muhammadiyah dan NU perlu lebih banyak terlibat dan bertindak pro-aktif dalam isu-isu keagamaan, perdamaian, dan demokrasi di tingkat regional dan internasional. Peran kedua ormas dalam bidang keagamaan, perdamaian, dan demokrasi perlu diperluas dan diperdalam spektrum pengaruhnya dengan bersinergi dengan organisasi Islam dan lembaga internasional lainnya. (*)

democratic narratives of Islam —at the national, regional, and international levels— from perspective of the world’s two largest Islamic organisations.

Method

The arguments in this book are built on the results of library research and fieldwork research conducted over three months (October-December 2018). The library academic research commenced in October 2018 with the collection of secondary data related to the roles of Muhammadiyah and NU in peacebuilding and democracy. This secondary data was collected from online and offline media sources. Meanwhile, fieldwork research was conducted in November 2018 by conjoining in-depth interviews and focus group discussions. In-depth interviews were conducted in Jakarta, Yogyakarta, Surakarta, Surabaya, and Magelang and focus group discussions were organised three times at the Centre for Security and Peace Studies (CSPS) UGM, Yogyakarta. Seventeen participants attended these three rounds of focus group discussions comprising academics, practitioners, and activists who are involved in the role of Muhammadiyah and NU in peacebuilding and democracy. Twenty-seven sources were interviewed, the majority of which were activists and figures within the Muhammadiyah and NU organisations.

Findings and Arguments

There are three proposed main arguments in this book. *First*, a democratic transition in Indonesia was only made possible by the strong and broad support from civil society groups, especially by Muhammadiyah and NU as the biggest Islamic mass organisations in Indonesia. Apart from the internal dynamic and complexity within both organisations, Muhammadiyah and NU were important and strategic actors at the forefront of dramatic political transition during a turbulent period. Since political transitions from

authoritarianism to democracy in many countries in the world are frequently marked by civil war, communal violence and prolonged conflict, the roles of Muhammadiyah and NU in ensuring a peaceful and civilised democratic transition are extremely noteworthy. Their central role in Indonesia's democratic transition was largely driven by the leaders of these two Islamic organisations at the time, Prof Amien Rais and K.H. Abdurrahman Wahid, two of the most prominent *Reformasi* figures in Indonesia. Both had the highest position in Indonesia at the time: Amien Rais as Chair of the MPR-RI and Abdurrahman Wahid as President of the Republic of Indonesia.

Second, Muhammadiyah and NU, through their inherent extensive 'structural forces' from the central board in Jakarta to branches board across the archipelago as well as through their 'cultural wings', have played a critical and significant role in the democratic consolidation process in Indonesia. Acting as the consolidators of democracy in Indonesia, Muhammadiyah and NU are renowned for their role in building 'positive peace' through various activities at the grassroots level such as in education, health-care provision, economic empowerment, philanthropy, disaster responses, and *dakwah* (Islamic proselytism.) activities. Muhammadiyah has demonstrated a remarkable contribution in the provision of social welfare and the promotion of social justice for the community, particularly in education, healthcare, economic, and disaster responses. And, NU promotes and mainstreams a peaceful and tolerant brand of Islam throughout Indonesia. Their cadres have been progressive in countering and combatting the growing religious intolerance and violent extremism narratives, both online and offline. In addition, both organisations have promoted a particular brand of Islam that is compatible with progress, democracy, and peace. Muhammadiyah has promoted '*Islam Berkemajuan*' (Islam with progress) since its 47th national congress in Makassar 2015, while NU has campaigned '*Islam Nusantara*' (Islam in the

Archipelago) since its 33rd national congress in Jombang 2015. Both '*Islam Berkemajuan*' and '*Islam Nusantara*' have the potential to become a template of peaceful, tolerant, and democratic Islam that can be emulated by Muslims across the world.

Third, Muhammadiyah and NU have also contributed to peacebuilding processes at the national, regional, and international level. Although, their peacebuilding efforts have yet to bring significant and brilliant impact/outcome, their active role in peacebuilding could be regarded as the 'antidote' to the face of Islam at the international level where some Islamic figures and movements have been involved in violent conflict in the Middle East, Central and South Asia. At the regional and international level, Muhammadiyah has delivered its philanthropy and humanitarian assistance in conflict zones including building hospitals in Myanmar's Rakhine State and Palestine; providing full scholarships for local communities in Mindanao in the Philippines and Pattani in southern Thailand; and initiating microeconomic development and education among the Bangsamoro in the Philippines. NU also has a strong commitment to conflict resolution and peacebuilding in several international conflict zones. For instance, in the sectarian conflict in Afghanistan, NU sent delegations of Islamic scholars (Ulema) and invited and facilitated dialogue and discussion between conflicting parties in an effort to formulate solutions to peace and cooperation. The NU's involvement in conflict zones has also been apparent in the long and complex Palestine and Israel conflict. NU attempted to pioneer a peace pathway through a peace mission initiated by Abdurrahman Wahid and later continued by K.H. Yahya Cholil Staquf.

Recommendations

This book proposes a number of recommendations not merely for policy-makers and the two organization of members of Muhammadiyah and NU but also for their strategic partners include

international communities. Not only related with the promotion of peacebuilding and democracy, it also covers some strategic ideas concerning the expected roles played by Muhammadiyah and NU both in national and international realm. These recommendations include:

- 1) Building a stronger, closer, and more collaborative relationship between Muhammadiyah and NU. Leaders of both organisations should be committed to distancing themselves from direct involvement in electoral politics that tends to be divisive. Muhammadiyah and NU should instead focus on being a ‘moral forces’ on the national social, political, and economic stage.
- 2) Broadening Indonesia’s Islamic alliances initiated by Muhammadiyah and NU by harnessing support from other Islamic organisations that have a strong commitment to peaceful and democratic Islam in Indonesia. A strategic axis of Muhammadiyah and NU needs to be expanded and strengthened to promote a ‘model’ of Indonesian Islam on the regional and international stage.
- 3) Encouraging Muhammadiyah and NU to become the defender and protector of the existence and the rights of other religious communities especially minority groups in Indonesia. Muhammadiyah and NU should act as a ‘bridge’ between Islamic communities and other religious minorities in Indonesia.
- 4) Developing strong, mutually respectful, and mutually supportive relationships between the government and Muhammadiyah and NU. This mutually constructive and harmonious relationship should be built upon broad national and public interest, not short-term political agendas.
- 5) Muhammadiyah and NU should be more active and engaged in issues of religion, peace, and democracy at both the regional and international levels. The roles of both orga-

nisations should be broadened in this respect, and their influence must be deepened through collaboration and cooperation with Islamic organisations across the world as well as other international institutions. (*)

Daftar Isi

|||||

Prakata Editorial	v
Kata Pengantar Rektor Universitas Gadjah Mada	ix
<i>Endorsement</i>	xiii
Ringkasan Eksekutif	xvii
<i>Executive Summary</i>	xxiii
Daftar Isi	xxix

BAB 1

Pendahuluan: Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam Bingkai Demokrasi dan Perdamaian	1
A. Tesis: Islam, Demokratisasi dan Perdamaian di Indonesia	8
B. Bingkai Teoretis: Demokrasi dan Perdamaian	10
C. Tiga Argumen	21
D. Konteks: Muhammadiyah dan NU di Arena Kontestasi	24

BAB 2

Menyemai Damai, Demokrasi dan Keadaban: Narasi Muhammadiyah, dari Lokal hingga Global	31
A. Kilasan Sejarah Muhammadiyah	33
1. Merintis Kemerdekaan dengan Pendidikan ...	34
2. Fatsun Politik Muhammadiyah	37
3. Muhammadiyah dan Perdamaian Dunia	41
4. Muhammadiyah: Pengayom dan Pemersatu Umat	41
B. Mengawal Reformasi dan Merawat Demokrasi	44
1. Mendorong Sukses Nasional	44
2. Mengawal Reformasi Damai	46

3. Merawat Demokrasi Berkeadaban	50
C. Pendidikan	57
1. Kristen-Muhammadiyah dan Pendidikan Interreligius	58
2. Pendidikan Perdamaian dan Demokrasi	66
3. Narasi Perdamaian dari Anak Muda dan Perempuan Muhammadiyah	77
D. Filantropi	82
1. Wujud Filantropi Muhammadiyah	83
2. Aksi Filantropi di Level Regional dan Internasional	86
E. Advokasi Minoritas dan HAM	94
1. Advokasi Minoritas dan HAM: Struktural dan Kultural	94
F. Bina Damai dan Rekonsiliasi Konflik	99
1. Muhammadiyah Sebagai Juru Damai Bangsa ..	99
2. Bina Damai di Kancah Regional dan Internasional	104
3. Agen-agen Perdamaian Muhammadiyah	119
G. Reformasi Tata Kelola SDA dan Agraria	125
1. Peranan Muhammadiyah dalam Reforma Agraria	125
2. Jihad Konstitusi dan Fikih Air	127
H. Simpul Penutup	132

BAB 3

Menyemai Damai, Demokrasi dan Keadaban:

Narasi Nahdlatul Ulama, dari Lokal hingga Global	135
A. Kilasan Sejarah NU	135
B. Beberapa Pemikiran NU Kontemporer	142
1. Kedudukan Perempuan	142
2. Islam Nusantara	145
3. Fikih Disabilitas	152
4. Lingkungan dan Sumber Daya Alam (SDA) ..	156
C. NU dan Transisi Demokrasi Era Reformasi 1998	162
1. Gus Dur dan Reformasi Damai	166

2. Rekonsiliasi Kultural	169
D. NU dan Filantropi	175
1. <i>NU Care</i> -LAZISNU	176
2. Koin NU	178
3. NU Peduli dan LPBI NU	179
E. Pengembangan Pendidikan NU dan Pendidikan Nasional	182
F. Membela Minoritas	186
1. Banser dan Pengamanan Rumah Ibadah	186
2. Pembelaan Minoritas	189
G. Inisiatif-Inisiatif Perdamaian Nasional dan Global ..	193
1. Meredam Arus Ekstremisme Keagamaan: Peran <i>NU-Online</i>	194
2. Isu Israel dan Perdamaian Global	198
3. Inisiatif Perdamaian Global	203
H. Simpul Penutup	205
 BAB 4	
Penutup: Narasi Damai dari Nusantara untuk Dunia	209
A. Dua Menyemai dan Merawat Demokrasi	211
B. Dua Menyemai dan Merawat Damai	215
C. Narasi Damai di Padang Sahara	218
D. Rekomendasi Kebijakan	220
 Daftar Narasumber	225
Daftar Pustaka	229
Biografi Singkat Penulis dan Peneliti	249